



Kementerian PPN/
Bappenas



implemented by:

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

REFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL

PROYEK PENGURANGAN EMISI
DI PERKOTAAN MELALUI PENINGKATAN
PENGELOLAAN SAMPAH (ERiC - DKTI)



REFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL

PROYEK PENGURANGAN EMISI
DI PERKOTAAN MELALUI PENINGKATAN
PENGELOLAAN SAMPAH (ERiC - DKTi)



SELAYANG PANDANG KERJASAMA REFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH

PROYEK KERJASAMA PENGURANGAN EMISI DI PERKOTAAN MELALUI PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH

Dalam rangka memperkuat implementasi RPJMN 2020-2024 terkait pengelolaan persampahan, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Jerman dengan implementasi oleh GIZ dalam **Proyek Pengurangan Emisi di Perkotaan melalui Peningkatan Pengelolaan Sampah (Emissions Reduction in Cities through Improved Waste Management - DKTI)**.

TUJUAN PROYEK

Mendukung perencanaan dan pengembangan sistem pengelolaan sampah dengan memperbaiki kondisi yang diperlukan (*enabling condition*) di tingkat nasional dan kota, mencakup upaya perbaikan pada aspek teknis, kelembagaan, pendanaan dan pembiayaan, serta kesetaraan gender dan inklusi sosial, sebagai upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

OUTPUT PROYEK

Keluaran proyek ini diarahkan untuk dapat menjadi masukan bagi penyusunan perencanaan dan kebijakan pengelolaan sampah pada tingkat nasional dan daerah. Kegiatan yang dilakukan antara lain penyusunan kajian dan rekomendasi kebijakan, pendampingan teknis, serta pelaksanaan *pilot project*.

STEERING COMMITTEE



Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional



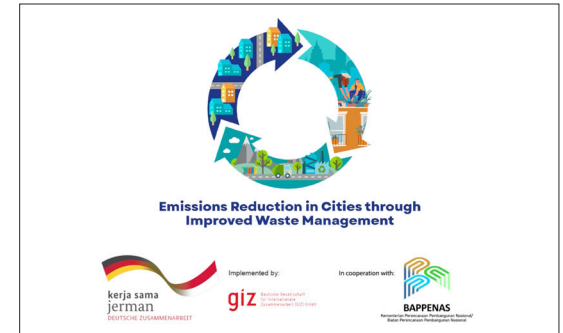
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan



Kementerian
Dalam Negeri



Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat



“Ringkasan Proyek”



SUMBER PENDANAAN

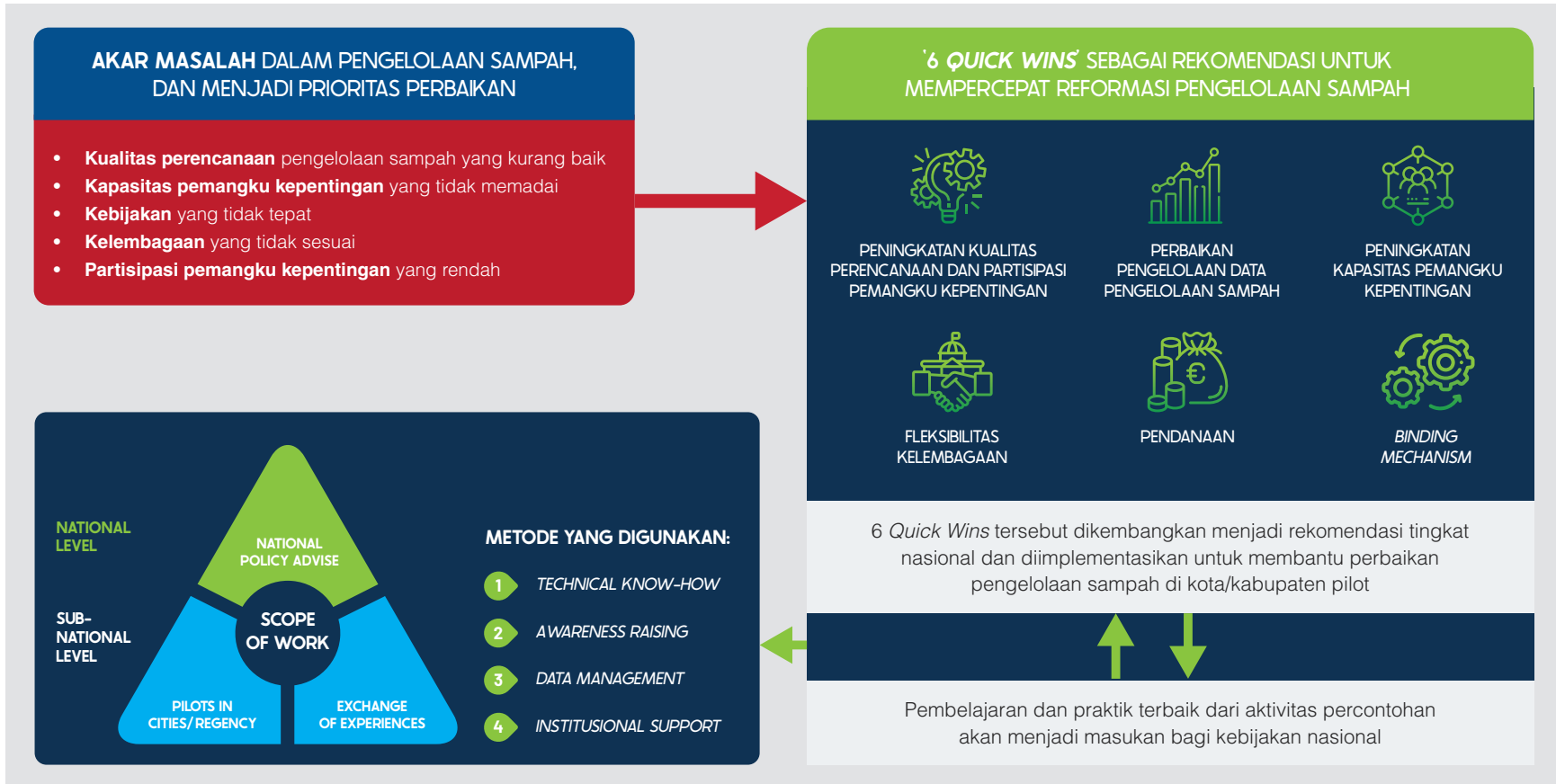
Kementerian Federal Kerjasama
Ekonomi dan Pembangunan (BMZ),
Pemerintah Republik Jerman



CAKUPAN PROYEK

Nasional (Indonesia)
dan **Subnasional**
(6 kota/kabupaten)

KERANGKA KERJA PROYEK



FOKUS AREA INTERVENSI PROYEK PADA 3 KELUARAN, YAITU: INSTRUMEN PERENCANAAN; PENGELOLAAN DATA; KAPASITAS PEMBIAYAAN/PENDANAAN

DAFTAR ISI

SELYANG PANDANG KERJASAMA REFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH 4

Proyek Kerjasama Penurunan
Emisi Melalui Peningkatan
Pengelolaan Sampah 4

KERANGKA KERJA PROYEK 5

DAFTAR ISI 6

REFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH 8

INTERVENSI REFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH PERCONTOHAN PROYEK ERiC DKTI 9

PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH YANG KOMPREHENSIF 10

PENGGUNAAN DATA SAMPAH HASIL *SAMPLING PRIMER* 11

PEMILIHAN MODEL PENGELOLAAN SAMPAH 12

PENINGKATAN KAPASITAS PENDANAAN/ PEMBIAYAAN 13

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SAMPAH 14

PENINGKATAN PARTISIPASI PUBLIK & INKLUSI SOSIAL 14

PILOT MEASURE DENGAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT(NGO) LOKAL 15

IMPACT STORIES 16

1. Impact Stories Kota Jambi 16
2. Impact Stories Kota Malang 18
3. Impact Stories Kota Bukittinggi 20
4. Impact Stories Kabupaten Bogor 21

INTERVENSI REFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH DI TINGKAT NASIONAL 22

1. Inisiasi Integrasi Satu Data Persampahan 22
2. Dukungan Perbaikan Pendanaan
Pengelolaan Sampah 24
3. Dukungan Analisis Kebijakan melalui
Kajian-kajian di tingkat Nasional 25



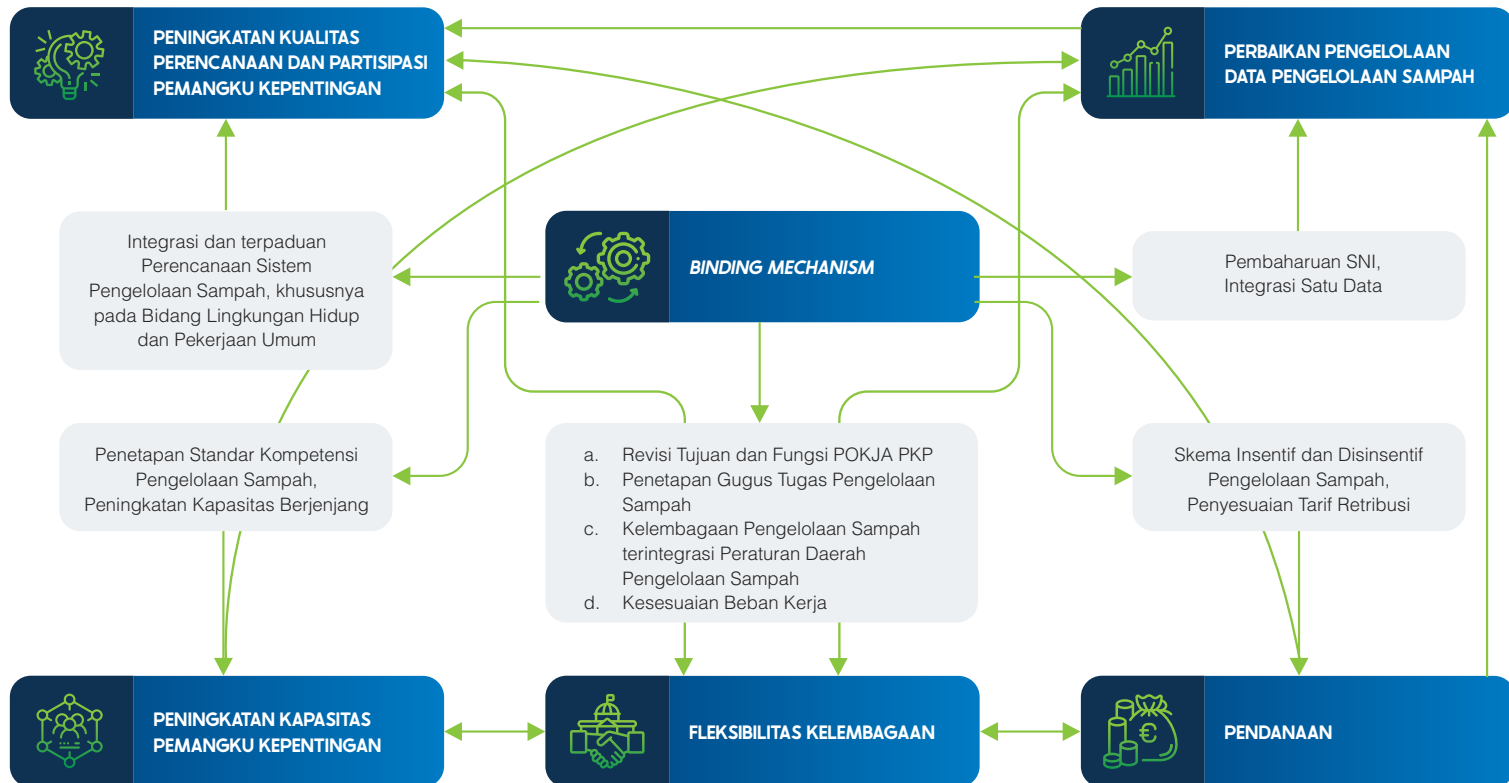


REFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH

MELIHAT LEBIH DEKAT '6 QUICK WINS' REFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH

Keenam *Quick Wins* yang diusulkan **saling terkait dan mendukung satu sama lain**. Rekomendasi secara holistik ini dirumuskan sebagai penguat reformasi perbaikan pengelolaan sampah di Indonesia.

Integrasi dari masing-masing *Quick Wins* menggambarkan bahwa untuk mencapai suatu tujuan perbaikan pengelolaan sampah, tidak dapat dilakukan secara parsial, namun merupakan kolaborasi berbagai pihak dan integrasi berbagai aspek penting pengelolaan sampah.



INTERVENSI REFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH PERCONTOHAN PROYEK ERIC DKTI

PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH (RIPS):

Pengumpulan & Perhitungan Data
terkait Sampah & Iklim

Pengembangan Kapasitas
untuk Perhitungan Biaya
dan Retribusi Sampah serta
Pengembangan Model
Pembiayaan

**Tindakan Percontohan
(Pilot Measure)**
untuk peningkatan
Rantai Nilai Sampah



1 KOTA BUKITTINGGI

3 KAB. BOGOR

5 KOTA MALANG

2 KOTA JAMBI

4 KOTA CIREBON

6 KOTA DENPASAR



PENINGKATAN KUALITAS
PERENCANAAN DAN
PARTISIPASI PEMANGKU
KEPENTINGAN



PERBAIKAN PENGELOLAAN
DATA PENGELOLAAN SAMPAH



PENINGKATAN KAPASITAS
PEMANGKU KEPENTINGAN



FLEKSIBILITAS
KELEMBAGAAN



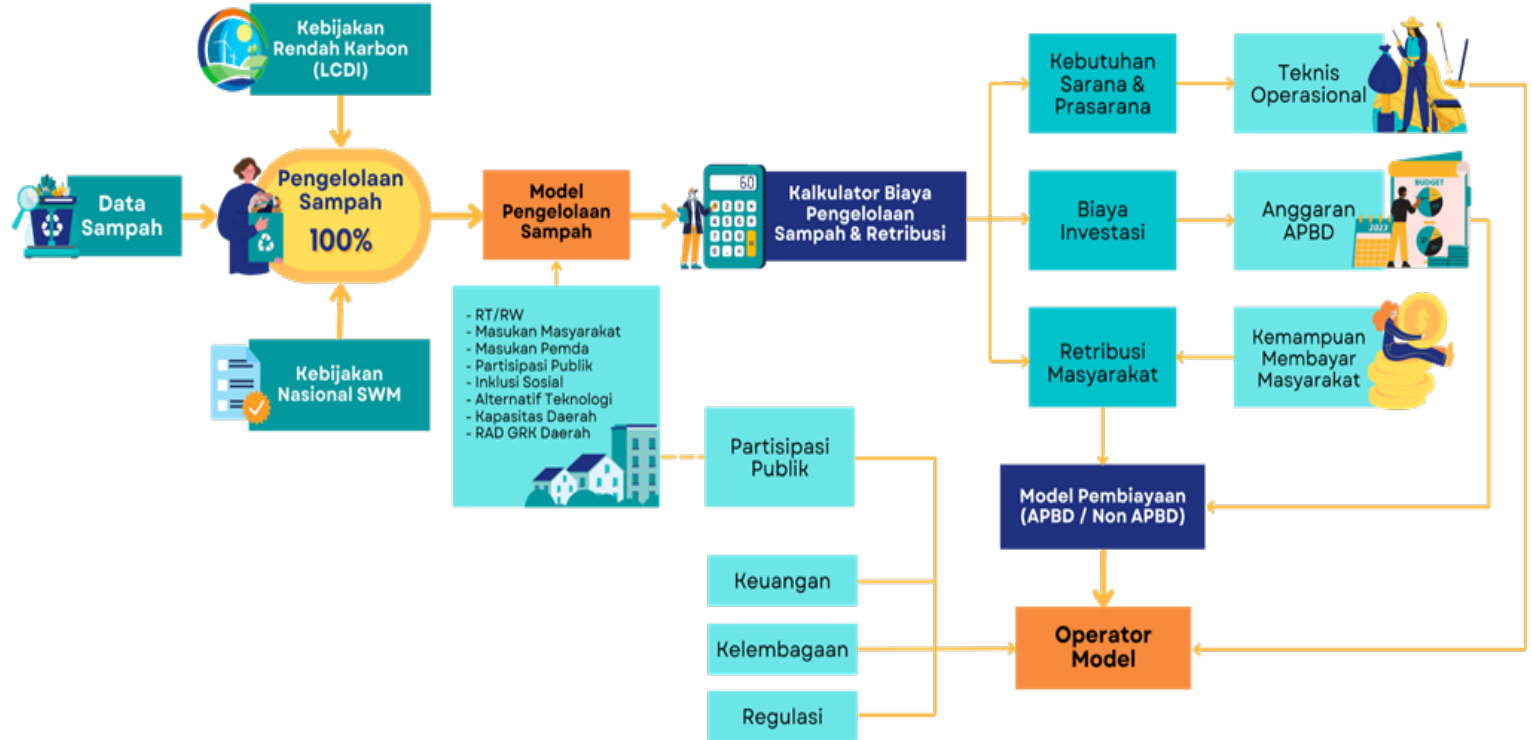
PENDANAAN



BINDING
MECHANISM

PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH YANG KOMPREHENSIF

Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) disusun dengan pertimbangan kuat terhadap aspek-aspek kunci meliputi teknis, kelembagaan, regulasi, keuangan, partisipasi publik, dan keterkaitan terhadap lingkungan dan pengurangan emisi gas rumah kaca



PERINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN



PERBAIKAN PENGELOLAAN DATA PENGELOLAAN SAMPAH



PENINGKATAN KAPASITAS PEMANGKU KEPENTINGAN



FLEKSIBILITAS KELEMBAGAAN



PENDANAAN



BINDING MECHANISM

Penyusunan RIPS dilakukan oleh kelompok kerja Pemerintah Kota/Kabupaten yang terdiri dari perwakilan lintas dinas/OPD dengan pendampingan intensif dari tenaga ahli Proyek ERiC DKTI. Proses penyusunan RIPS melibatkan masukan dari pemangku kepentingan terkait, baik dari pihak pemerintah maupun non pemerintah sehingga dihasilkan rekomendasi Sistem Pengelolaan Sampah (SPS) yang sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, dan karakteristik masing-masing daerah.

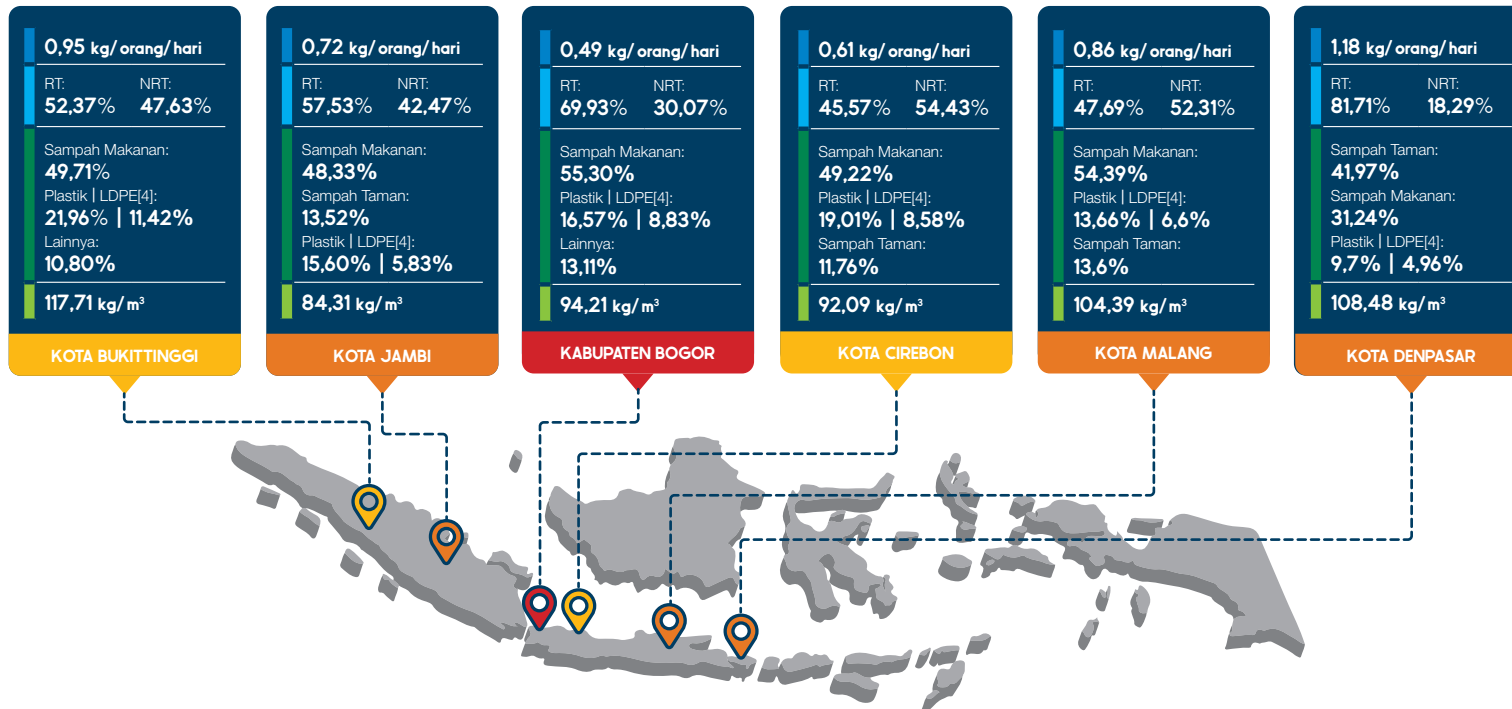
PENGUNAAN DATA SAMPAH HASIL SAMPLING PRIMER

Aspek Teknis:

Data Timbulan & Komposisi Sampah

DATA SAMPAH

Timbulan dan komposisi sampah merupakan komponen penting dalam perencanaan pengelolaan sampah. Dalam penyusunan RIPS, pengambilan sampling primer timbulan dan komposisi sampah di wilayah Proyek dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dan terkini. Data tersebut digunakan untuk membuat diagram alir sampah dari sumber sampah hingga TPA. Melalui diagram alir sampah, pemerintah daerah dapat mengetahui titik-titik kebocoran sampah ke lingkungan serta merumuskan upaya yang tepat untuk mencegah kebocoran sampah dan mewujudkan 100% sampah terkelola.



Angka timbulan sampah per kapita tidak selalu sebanding dengan jumlah populasi kota/kabupaten namun lebih dipengaruhi oleh faktor socio-ekonomi dan budaya setempat seperti pengeluaran perkapita dan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah setempat.



PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN



PERBAIKAN PENGELOLAAN DATA PENGELOLAAN SAMPAH



PENINGKATAN KAPASITAS PEMANGKU KEPENTINGAN



FLEKSIBILITAS KELEMBAGAAN



PENDANAAN



BINDING MECHANISM

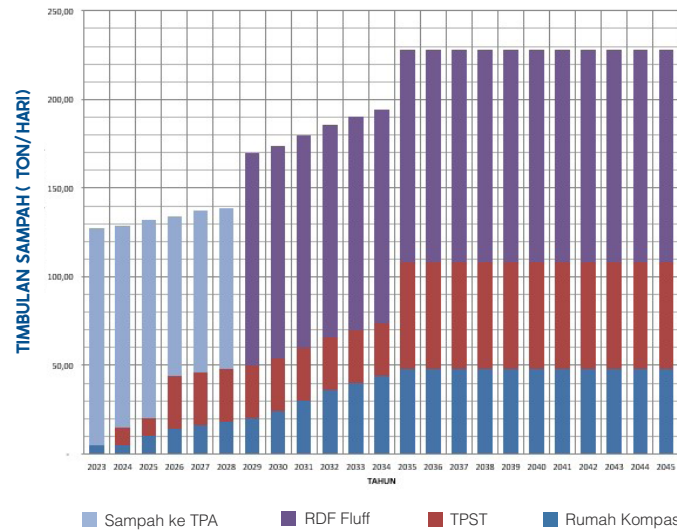
Aspek Teknis: Proyeksi Timbulan Sampah & Emisi GRK

PEMILIHAN MODEL PENGELOLAAN SAMPAH

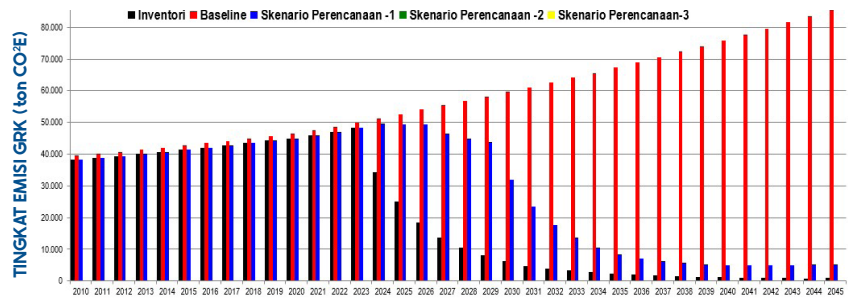
SIMULASI MODEL PENGELOLAAN SAMPAH DI SALAH SATU KOTA PERCONTOHAN UNTUK PERIODE PERENCANAAN 2025-2045

Mengacu kepada diagram alir sampah yang telah dihasilkan, dilakukan pemilihan model pengelolaan sampah yang spesifik untuk setiap kota/kabupaten percontohan. Pemilihan model ini mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, serta kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di setiap daerah. Sebagai langkah awal dilakukan proyeksi timbulan sampah dan perhitungan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sesuai periode perencanaan RIPS yang akan disusun.

SIMULASI MODEL PENGELOLAAN SAMPAH DI SALAH SATU KOTA DI WILAYAH PROYEK PERIODE 2025-2045



PROYEKSI TREN TINGKAT EMISI INVENTORI, BASELINE, DAN PERENCANAAN



PERINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN

PERBAIKAN PENGELOLAAN DATA PENGELOLAAN SAMPAH

PERINGKATAN KAPASITAS PEMANGKU KEPENTINGAN

FLEKSIBILITAS KELEMBAGAAN

PENDANAAN

BINDING MECHANISM

PENINGKATAN KAPASITAS PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Aspek Pembiayaan & Pendanaan

PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA PENGELOLAAN SAMPAH

Berdasarkan Model Pengelolaan Sampah yang telah ditentukan, Biaya Pengelolaan Sampah dihitung dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7/2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penanganan Sampah. Perhitungan mencakup biaya pengumpulan hingga pemrosesan akhir.

PRINSIP DAN TUJUAN PENETAPAN	BIAYA RETRIBUSI	= Biaya Penanganan Sampah Ideal	- Biaya Penanganan yang ditutup Non Retribusi. Misal: APBD
	Pemanfaatan Hasil Retribusi		Pendanaan Kegiatan Penanganan Sampah
	Tujuan ditetapkannya Permendagri 7/2021 : <ul style="list-style-type: none"> Memahami standar pengelolaan persampahan Memahami retribusi sebagai salah satu sumber pembiayaan persampahan dan cara perhitungannya 		
	Tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian pelayanan		

PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI SAMPAH

Data Biaya Pengelolaan Sampah menjadi input bagi perhitungan Tarif Retribusi Sampah. Penentuan tarif mempertimbangkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Willingness and ability to pay masyarakat. Perbaikan tarif retribusi dilakukan bertahap, menyesuaikan kapasitas dan kebutuhan daerah.

Mendukung Pay Polluter Principal dengan penetapan tarif yang berkeadilan, rekomendasi tarif tersedia dalam beberapa pilihan: tarif flat (Rp/KK), berbasis massa (Rp/kg), berbasis volume (Rp/m³). Subsidi silang juga diterapkan oleh sejumlah kota/ kabupaten untuk mengupayakan besaran tarif yang sesuai dengan kapasitas setiap wajib retribusi.

PENGEMBANGAN MODEL KEUANGAN PENGELOLAAN SAMPAH

Untuk dapat mengimplementasikan model pengelolaan sampah yang telah dirancang, diperlukan Model Keuangan Pengelolaan Sampah yang handal. Diawali dengan identifikasi kondisi awal keuangan daerah dalam penanganan sampah untuk melihat kesenjangan pembiayaan sebagai dasar penyusunan model keuangan untuk setiap tahapan periode perencanaan RIPS.

Analisis kelayakan keuangan dan ekonomi penanganan sampah jangka panjang juga dilakukan untuk memastikan kapasitas daerah dalam menjalankan model keuangan yang telah dirancang. Beberapa daerah juga memerlukan analisis sumber pembiayaan alternatif untuk menutup kesenjangan pembiayaan yang muncul. Pada tahap akhir, disusun program serta kegiatan keuangan dan ekonomi pengelolaan sampah sebagai bagian dari perencanaan dalam RIPS.

REKOMENDASI KEBIJAKAN TERKAIT ASPEK PEMBIAYAAN/PENDANAAN PENGELOLAAN SAMPAH:

Diseminasi Permendagri 7/2021 yang lebih luas untuk implementasi perencanaan pembiayaan dan tarif retribusi sampah yang lebih baik. Hal ini juga mendukung penerapan UU HKPD 1/2022.

Pengembangan lebih lanjut metode perhitungan dalam Permendagri 7/2021 untuk dapat mempertimbangkan parameter perhitungan nilai uang yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan model pengelolaan sampah di daerah.

Perbaikan manajemen aset daerah untuk efisiensi biaya pengelolaan sampah.

PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN

PERBAIKAN PENGELOLAAN DATA PENGELOLAAN SAMPAH

PENINGKATAN KAPASITAS PEMANGKU KEPENTINGAN

FLEKSIBILITAS KELEMBAGAAN

PENDANAAN

BINDING MECHANISM

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SAMPAH

KONSEP OPERATOR MODEL

Pengembangan pengaturan kelembagaan Sistem Pengelolaan Sampah diarahkan untuk **mengatur pembagian peran setiap aktor yang terlibat, mencakup pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan sektor informal.** Tidak hanya memisahkan peran regulator dan operator, konsep yang diajukan dalam pendampingan ini mengadopsi konsep Operator Model, untuk memisahkan peran **Perencana (Planner), Kliien (Client), Pengumpul Pendapatan (Revenue Collector), Operator, Regulator, dan Pembuat Kebijakan (Policy Maker).** Dengan pembagian peran ini, diharapkan setiap aktor dapat menjalankan fungsinya dengan lebih terarah dan efektif.

PERENCANA

Bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan yang strategis, menentukan investasi fisik, model operator, dan langkah-langkah non-teknis yang diperlukan untuk pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir

PEMBAUT KEBIJAKAN

Peraturan dan kebijakan yang ditetapkan di tingkat Nasional dan diimplementasikan di tingkat Regional dan lokal

REGULATOR

Penyusun kebijakan, pengawas, dan penegak kepatuhan terhadap standar norma hukum yang berlaku berkaitan dengan pengelolaan sampah

KLIEN

Bertanggung jawab untuk memastikan penyediaan sistem pengelolaan sampah yang andal memenuhi standar yang di persyaratkan

PENGUMPUL PENDAPATAN

Mengumpulkan pendapatan/ retribusi untuk pengelolaan sampah, memastikan bahwa dana yang dikumpulkan benar-benar masuk ke penyedia layanan

OPERATOR

Bertanggung jawab atas teknis pelayanan pengelolaan sampah di lapangan



BEST PRACTICE KONSEP OPERATOR MODEL

Kota Jambi menerapkan kelembagaan yang menempatkan DLH sebagai regulator dan pihak ketiga sebagai operator penyedia jasa layanan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Unit Kegiatan Masyarakat (UKM) dan sektor informal menjadi operator di tingkat kecamatan dan kelurahan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) direncanakan untuk berfungsi sebagai operator

PENINGKATAN PARTISIPASI PUBLIK & INKLUSI SOSIAL

PARTISIPASI PERANGKAT DAERAH



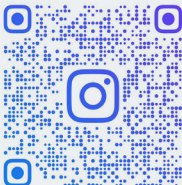
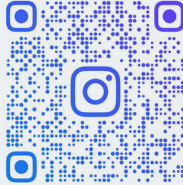
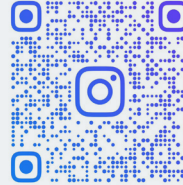
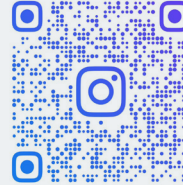

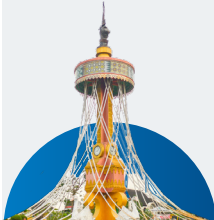


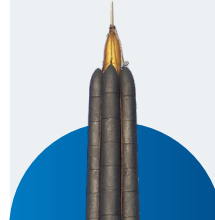
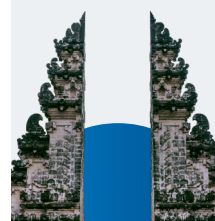
Pelibatan dinas-dinas terkait, kecamatan, dan kelurahan di Kota / Kabupaten untuk mengembangkan konsep pengelolaan sampah serta memastikan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dapat dilakukan secara terintegrasi dalam mendukung pengelolaan sampah sesuai peraturan daerah yang berlaku.

- 1 Dinas Kesehatan
- 4 Dinas Pertanian
- 2 Dinas Pendidikan
- 5 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 3 Dinas Sosial

PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN
 PERBAIKAN PENGELOLAAN DATA PENGELOLAAN SAMPAH
 PENINGKATAN KAPASITAS PEMANGKU KEPENTINGAN
 FLEKSIBILITAS KELEMBAGAAN
 PENDANAAN
 BINDING MECHANISM

PILOT MEASURE DENGAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT(NGO) LOKAL

Kegiatan *pilot measure* di 6 Kota/Kabupaten bertujuan untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam mendukung perbaikan pengelolaan sampah di wilayah percontohan. Perbaikan tata kelola dilakukan pada beberapa fasilitas pengolahan sampah di daerah seperti: TPS3R, PKD, Bank Sampah, Rumah Maggot dan Kompos.

KOTA BUKITTINGGI	KOTA JAMBI	KABUPATEN BOGOR	KOTA CIREBON	KOTA MALANG	KOTA DENPASAR
					
<p>WALHI SUMBAR</p>	<p>JAMBI ENVIRO</p>	<p>BUMI WINAYA LESTARI</p>	<p>GREENERATION CIREBON</p>	<p>SIMTESIS</p>	<p>YAYASAN GRINGGO</p>
<p>Area <i>Pilot Measure</i>: Rumah Maggot & Rumah Kompos Kel. Bukit Apit Puhun</p>	<p>Area <i>Pilot Measure</i>: TPS3R Sulur Berkah dan TPS3R Gading</p>	<p>Area <i>Pilot Measure</i>: RW 10 Puspanegara dan Desa Sukaesmi, Kec. Megamendung</p>	<p>Area <i>Pilot Measure</i>: RW6 Simaja Utara, Kel. Drajat dan RW10 Perumahan Kalijaga, Kel. Kalijaga</p>	<p>Area <i>Pilot Measure</i>: PKD Tlogomas dan TPS3R Buring</p>	<p>Area <i>Pilot Measure</i>: Banjar Badak Sari, Desa Sumerta Kelod</p>
<p>April-Okt 2023</p>	<p>Feb-Agustus 2023</p>	<p>Mei-Nov 2023</p>	<p>Juni 2023-Jan 2024</p>	<p>Des 2022- Juni 2024</p>	<p>Juni- Des 2023</p>
					



PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN



PERBAIKAN PENGELOLAAN DATA PENGELOLAAN SAMPAH



PENINGKATAN KAPASITAS PEMANGKU KEPENTINGAN



FLEKSIBILITAS KELEMBAGAAN



PENDANAAN



BINDING MECHANISM



IMPACT STORIES: KOTA JAMBI

IMPACT STORY - TPS3R SULUR BERKAH

PEMILAHAN SAMPAH DI SUMBER

Sebanyak 70 KK diintervensi pada RT terpilih (RT 16 dan 17) melakukan pemilahan sampah dari sumber dengan sistem penjemputan terjadwal selama 2 minggu sekali (Minggu 1 RT 16, Minggu 2 RT 17) setiap Sabtu pukul 15.00. Selama 3 bulan implementasi total sampah anorganik terpilah mencapai 1.000kg sampah dengan kertas 53,5%, logam 28,1%, dan plastik 18,5%. Penjemputan sampah terpilah masih terus dijalankan hingga saat ini.

54 KK terdaftar a/n perempuan

16 KK terdaftar a/n laki-laki

PERAN MASYARAKAT

Masyarakat secara aktif turut berperan dalam melakukan edukasi sehingga terbentuk 9 orang kader lingkungan di 2 RT terpilih didampingi 2 orang fasilitator yang melakukan sosialisasi secara *door to door* dan mengajak masyarakat lain untuk secara aktif melakukan pemilahan sampah dari sumber.

9 kader perempuan

2 fasilitator laki-laki

EMISI GRK

Potensi emisi GRK yang dapat dihindari dari kegiatan pengomposan 787,90 kg/hari sebesar **458,25 ton CO²eq/**

MANAJEMEN OPERASIONAL

Integrasi TPS3R Sulur Berkah dan Bank Sampah Sulur Berkah dalam program pemilahan sampah di tingkat sumber sehingga sebanyak **70 KK yang memilah sampah** dijadikan sebagai nasabah Bank Sampah sehingga pengelolaan bank sampah menjadi lebih aktif.



PENINGKATAN KUALITAS
PERENCANAAN DAN
PARTISIPASI PEMANGKU
KEPENTINGAN



PERBAIKAN PENGELOLAAN
DATA PENGELOLAAN SAMPAH



PENINGKATAN KAPASITAS
PEMANGKU KEPENTINGAN



FLEKSIBILITAS
KELEMBAGAAN



PENDANAAN



BINDING
MECHANISM

IMPACT STORIES: KOTA JAMBI



IMPACT STORY - TPS3R GADING

MANAJEMEN OPERASIONAL

Peningkatan manajerial operasional melalui:

- Penambahan personel berupa admin yang melakukan pendataan dan monitoring harian, serta pengelolaan keuangan satu pintu melalui admin atas persetujuan ketua KSM
- Integrasi sektor informal (gerobak motor liar) menjadi operator penjemputan sampah formal di TPS3R Gading
- Pengaturan jam kerja yang awalnya hanya 3 jam setiap hari (jam 10.00-13.00), menjadi Senin - Sabtu dengan 8 jam kerja (08.00-17.00).

JUMLAH PELANGGAN

Peningkatan jumlah pelanggan TPS 3R Gading **sekitar 46% dari 323 KK menjadi 473 KK.**

PEMILAHAN SAMPAH DI SUMBER

Sebanyak 38 KK (dari 80 KK diintervensi) pada 2 blok terpilih melakukan pemilahan sampah dari sumber dengan sistem penjemputan terjadwal selama 2 minggu sekali. Setelah 1 bulan implementasi total sampah anorganik terpilah dari program ini adalah 130 kg dengan kertas 37,2%, logam 28,5%, dan plastik 34,4%.

15 KK terdaftar a/n perempuan

23 KK terdaftar a/n laki-laki

EMISI GRK

Potensi emisi GRK yang dapat dihindari dari optimalisasi kegiatan pengomposan 45 kg/hari dan budidaya maggot 41,6 kg/hari sebesar **51,94 ton CO²eq/tahun.**

PENGURANGAN SAMPAH

Peningkatan persentase pengurangan sampah ke TPA **dari 1% menjadi 5%.**

PERAN MASYARAKAT

Masyarakat secara aktif turut berperan dalam melakukan edukasi sehingga terbentuk 5 orang kader lingkungan di 2 blok terpilih didampingi 2 orang fasilitator yang melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat lain untuk secara aktif melakukan pemilahan sampah dari sumber.

2 kader perempuan

3 kader laki-laki

2 fasilitator laki-laki



PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN



PERBAIKAN PENGELOLAAN DATA PENGELOLAAN SAMPAH



PENINGKATAN KAPASITAS PEMANGKU KEPENTINGAN



FLEKSIBILITAS KELEMBAGAAN



PENDANAAN



BINDING MECHANISM



IMPACT STORIES: KOTA MALANG

IMPACT STORY - KOLAB PKD TLOGOMAS

SOSIAL

- 11 dari 12 café di Apartemen Begawan terlibat aktif dalam pemilahan sampah dari bulan Januari-sekarang
- 50 pegawai PKD terlibat dalam penyusunan format pendataan sampah
- 3 NGO, 3 swasta, 1 intitusi pendidikan, dan 1 lembaga pemerintah terlibat dalam inisiasi forum persampahan lintas sektor

TEKNIS

- Studi teknis panduan untuk pengelolaan sampah bertanggung jawab sektor komersial di Kota Malang sudah disusun
- 2,16 ton sampah organik berhasil dicegah masuk ke TPA dan menghindari potensi emisi **20,25 ton CO²**
- Penjadwalan pengangkutan sampah organik jam 07.00
- SOP proses pengomposan di Rumah PKD sudah disusun dan diimplementasikan

KELEMBAGAAN

- Format pendataan digunakan oleh DLH Kota Malang untuk optimalisasi pengumpulan data laporan SIPSN
- 5 kerjasama terbentuk antara SIMTESIS dengan lembaga/NGO/Swasta untuk mendukung keberlanjutan program



PENINGKATAN KUALITAS
PERENCANAAN DAN
PARTISIPASI PEMANGKU
KEPENTINGAN



PERBAIKAN PENGELOLAAN
DATA PENGELOLAAN SAMPAH



PENINGKATAN KAPASITAS
PEMANGKU KEPENTINGAN



FLEKSIBILITAS
KELEMBAGAAN



PENDANAAN



BINDING
MECHANISM

IMPACT STORIES: KOTA MALANG



IMPACT STORY - KOLAB TPS 3R BURING

SOSIAL

- 160 KK di RW 02 Kelurahan Buring terlibat aktif dalam pemilahan sampah selama 2 bulan implementasi program dengan jadwal pengumpulan 2 hari sekali
- 45 anggota PKK terlibat aktif merawat tanaman hingga saat ini sebagai hasil dari *workshop* peran perempuan dalam ketahanan pangan dan pengelolaan sampah
- 34 penggerobak terlibat dalam cek kesehatan gratis dan berhasil dilakukan pendataan untuk pembentukan data base dan kartu identitas penggerobak
- 11 masyarakat (6 perempuan, 5 laki-laki) terlibat aktif sebagai kader lingkungan

TEKNIS

- *Waste Flow Diagram* sudah disusun
- Potensi emisi GRK yang dihindari adalah sebesar **197.97 ton CO²eq**
- Peningkatan besar pengurangan sampah di Kelurahan Buring **dari 0% menjadi 3,2%**
- **67% atau 2,3 ton sampah berhasil didaur ulang** di RW 02 dengan komposisi sampah 55% sampah makanan, 30% sampah kebun, 1,3% tekstil, 4% sampah plastik, dan 0,3% sampah logam
- Penambahan kapasitas pengolahan sampah BSF 100 kg/ hari dan kompos 275 kg/ hari
- Penambahan unit Urban Farming dan Budidaya Ikan untuk mendukung sirkularitas produk olahan sampah (BSF dan Kompos)

REGULASI

- Inisiasi penyusunan peraturan skala kelurahan untuk optimalisasi daerah layanan bersama penggerobak dan RW

KELEMBAGAAN

- SOP Pengolahan sampah, format arus kas, dan laporan keuangan di TPS 3R Buring sudah dibentuk
- 1 Kelompok Tani untuk mendukung program urban farming berhasil dibentuk
- Forum TPS 3R se-Kota Malang berhasil di inisiasi
- Inisiasi integrasi penggerobak ke dalam sistem kelurahan
- Kerjasama CSR dengan 2 perusahaan berhasil dibentuk
- Kerjasama program dengan DLH dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berhasil dijalankan

REGULASI

- Proposal bisnis TPS 3R Buring berhasil disusun
- KPP Bangkit sudah bisa menjual produk BSF dan kompos



PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN



PERBAIKAN PENGELOLAAN DATA PENGELOLAAN SAMPAH



PENINGKATAN KAPASITAS PEMANGKU KEPENTINGAN



FLEKSIBILITAS KELEMBAGAAN



PENDANAAN



BINDING MECHANISM



IMPACT STORIES: KOTA BUKITTINGGI

IMPACT STORY - RUMAH MAGGOT DAN KOMPOS- KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN

PEMILAHAN SAMPAH DARI SUMBER

- Sebanyak 49 KK (dari 100 KK diintervensi) di RW 4 Bukit Apit Puhun melakukan pemilahan sampah organik dari sumbernya secara rutin dengan jadwal penjemputan tiga kali dalam seminggu (Selasa, Kamis dan Sabtu). Pada pukul 08.00 WIB. selama 4 bulan implementasi (Agustus-November)
- Pemilah sampah: 45 KK a/n perempuan 4 KK a/n laki-laki

EMISI GRK

- Potensi emisi GRK yang dapat dihindari dari kegiatan pemilahan sampah organik adalah **5,48 ton CO₂eq/tahun**

MANAJEMEN OPERASIONAL

- Telah dibentuk kader pengurus Rumah Maggot Sejati Bukit Apit Puhun, selanjutnya akan mengelola demplot pertanian perkotaan dan demplot perikanan darat di Bukit Apit Puhun.



PENINGKATAN KUALITAS
PERENCANAAN DAN
PARTISIPASI PEMANGKU
KEPENTINGAN



PERBAIKAN PENGELOLAAN
DATA PENGELOLAAN SAMPAH



PENINGKATAN KAPASITAS
PEMANGKU KEPENTINGAN



FLEKSIBILITAS
KELEMBAGAAN



PENDANAAN



BINDING
MECHANISM

IMPACT STORIES: KABUPATEN BOGOR



IMPACT STORY -BANK SAMPAH RW 10 PUSPANEGARA

PEMILAHAN SAMPAH DI SUMBER

- Pengurangan sampah sd Bulan Oktober : **11.431 Kg / 1,4 ton** > Pengurangan sampah per hari 76,2 kg
- Kegiatan memilah sampah dari sumber rumah tangga terpilih dengan :
 - Bank Sampah > 201 nasabah tersebar di 4 RT
 - Komposter 40 unit > dipergunakan oleh 134 KK
 - Ember Maggot 40 unit > dipergunakan oleh 23 KK
 - Tempat Ecoenzyme 22 unit > Proses sentralisir

PERAN SERTA MASYARAKAT

- Pengurus bank sampah, PKK aktif untuk edukasi, sosialisasi serta mengajak rumah tangga terpilih memilah sampah dari sumber sesuai dengan tempat dan manfaatnya
- Dukungan pemangku kebijakan lokal RT, RW yang cukup baik untuk mendukung program
- Munculnya inovasi dari masyarakat contoh : membuat alat sederhana untuk mesin pencacah daun
- Terbentuk bank sampah tingkat RW sebagai upaya meningkatkan nilai jual pilahan di Bank Sampah Unit RT
- Kerjasama dengan UPK SS45 (Koperasi Sawargi Sadaya Empat Lima) untuk pengelolaan RDF

EMISI GRK

- Potensi emisi GRK yang dapat dihindari dari kegiatan pemilahan sampah organik adalah **18.97 ton CO₂eq/tahun**



PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN



PERBAIKAN PENGELOLAAN DATA PENGELOLAAN SAMPAH



PENINGKATAN KAPASITAS PEMANGKU KEPENTINGAN



FLEKSIBILITAS KELEMBAGAAN



PENDANAAN



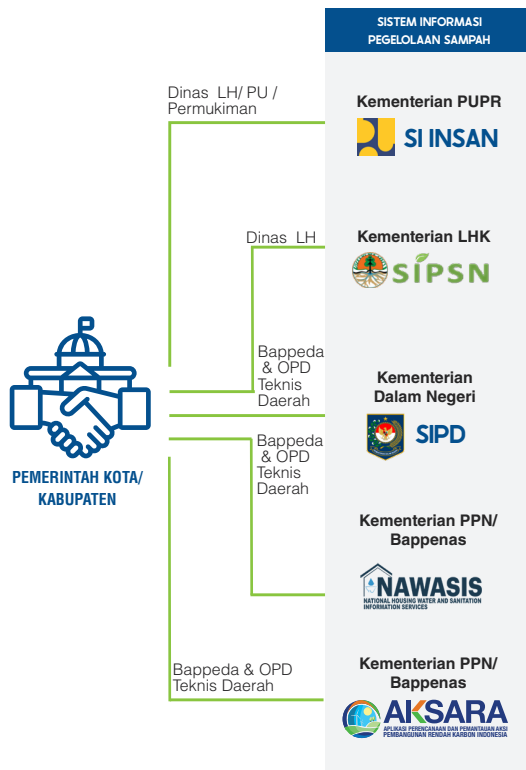
BINDING MECHANISM

INTERVENSI REFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH DI TINGKAT NASIONAL

1. INISIASI INTEGRASI SATU DATA PERSAMPAHAN

Saat ini setidaknya terdapat 5 (lima) sistem informasi terkait pengelolaan sampah di kementerian dengan standar data dan nilai yang berbeda, yaitu: **SIPSN (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)**, **SI INSAN (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)**, **SIPD (Kementerian Dalam Negeri)**, **NAWASIS (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas)**, dan **AKSARA (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas)**

KONDISI EKSTING PENGELOLAAN DATA TERKAIT PERSAMPAHAN



INTEROPERABILITAS DATA - INTEGRASI SATU DATA PERSAMPAHAN



- Implementasi interoperabilitas data di sektor persampahan mewujudkan data input yang lebih efisien sehingga kota/kabupaten hanya perlu menginput satu macam data ke satu platform pelaporan.
- Konsep ini akan mendorong keterpaduan data sektor persampahan yang lebih akurat, aktual untuk dasar perencanaan, serta dapat dibagi pakai bersama.

PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN



PERBAIKAN PENGELOLAAN DATA PENGELOLAAN SAMPAH



PENINGKATAN KAPASITAS PEMANGKU KEPENTINGAN



FLEKSIBILITAS KELEMBAGAAN



PENDANAAN



BINDING MECHANISM

UNTUK MENCAPAI DATA SAMPAH YANG TERINTEGASI, UPAYA PENINGKATAN TATA KELOLA DATA DI SEKTOR PERSAMPAHAN YANG DILAKUKAN DALAM PROYEK INI, ANTARA LAIN:

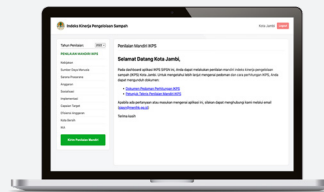
LEVEL NASIONAL:

- Pengembangan **Data warehouse** pada Platform Sistem Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) (<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/home/dw>), sebagai infrastruktur digital pendukung implementasi satu data sektor persampahan yang memungkinkan mekanisme bagi pakai atau interoperabilitas data antar sistem informasi

- Penyusunan **Petunjuk Teknis Interoperabilitas Data** di sektor persampahan (termasuk di dalamnya Katalog Unsur Persampahan Indonesia/KUPI), sebagai rujukan standar data dan mekanisme interoperabilitas data antar sistem informasi yang memuat data terkait persampahan. Implementasi interoperabilitas dapat menyederhanakan data input di level kota/kabupaten serta menghindari duplikasi data



- Pengembangan **kalkulator digital perhitungan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)** (<https://ikps.menlhk.go.id/>) pada Platform SIPSN. Kalkulator ini merupakan alat bantu Pemerintah untuk menghitung secara cepat IKPS suatu daerah dan juga menjadi daya ungkit untuk peningkatan keterisian data di SIPSN



- Policy Brief Transformasi Kualitas Data Persampahan untuk Pengelolaan Sampah yang Efektif dan Efisien. Dalam Policy Brief ini terdapat rekomendasi untuk meningkatkan kualitas data persampahan berupa rekomendasi pembaruan standar metode pengambilan sampel sampah dan mendorong Pemerintah Daerah melakukan pengambilan data timbulan sampah secara langsung



LEVEL KOTA/KABUPATEN:

- Pengembangan format pencatatan dan pelaporan data pengelolaan sampah di tingkat fasilitas pengelolaan sampah berupa *logbook*. *Logbook* ini mengadaptasi isian data pada SIPSN dan AKSARA (aplikasi perencanaan dan pemantauan rencana aksi nasional rendah karbon). *Logbook* diharapkan dapat membantu kota/kabupaten dalam pelaporan dan pemantauan data pengelolaan sampah

- Peningkatan kapasitas pemda melakukan pencatatan dan pelaporan data ke SIPSN dan AKSARA serta perhitungan Gas Rumah Kaca.



PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN



PERBAIKAN PENGELOLAAN DATA PENGELOLAAN SAMPAH



PENINGKATAN KAPASITAS PEMANGKU KEPENTINGAN



FLEKSIBILITAS KELEMBAGAAN



PENDANAAN



BINDING MECHANISM

2. DUKUNGAN PERBAIKAN PENDANAAN PENGELOLAAN SAMPAH

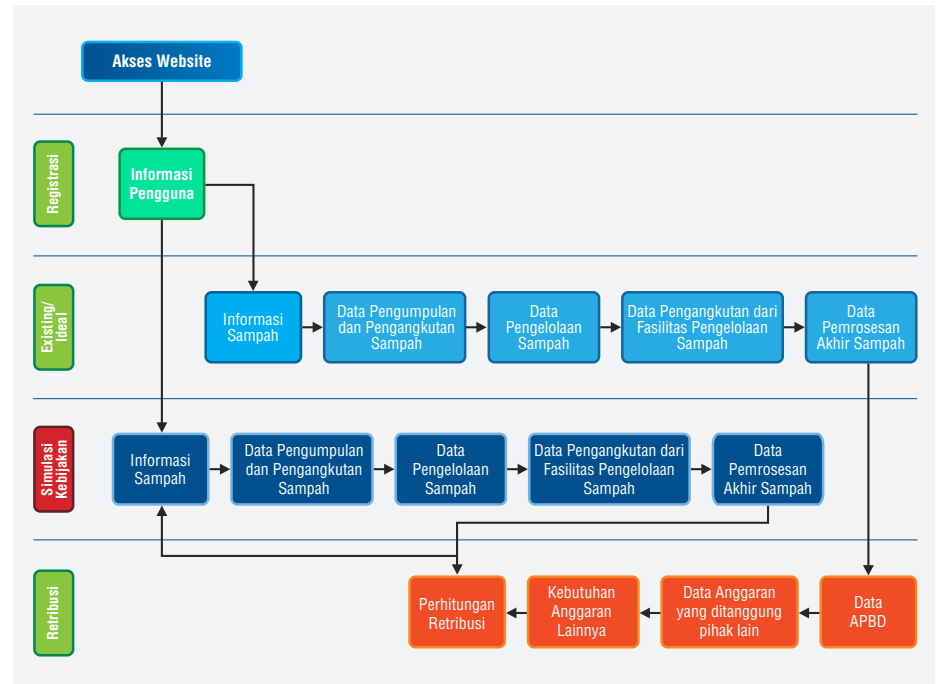
PENGEMBANGAN KALKULATOR DIGITAL PERHITUNGAN BIAYA PENGELOLAAN DAN TARIF RETRIBUSI SAMPAH



Produk ini merupakan digitalisasi dari kalkulator Permendagri 7/2021 yang dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan di tingkat nasional, pembelajaran dari pendampingan di kota/kabupaten percontohan ERIC DKTI, serta hasil uji coba melibatkan Pemerintah Daerah.

Kalkulator digital ini diharapkan dapat menjadi alat bantu yang memudahkan para pemangku kepentingan dalam menghitung biaya pengelolaan sampah dan tarif retribusi untuk kondisi eksisting maupun skenario perencanaan.

PROSES PERHITUNGAN DALAM DIGITAL KALKULATOR (FULL SKENARIO)



Lebih dari kalkulator digital dalam mendukung implementasi Permendagri No. 07/2021 untuk penyesuaian perhitungan tarif retribusi

- Akses online dan penggunaan yang lebih mudah
- Hasil perhitungan tersimpan dalam database dan dapat diunduh
- Dapat menghitung dengan multi-skenario Eksisting Inventory, Eksisting Ideal, Simulasi Kebijakan untuk Perencanaan)



PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN



PERBAIKAN PENGELOLAAN DATA PENGELOLAAN SAMPAH



PENINGKATAN KAPASITAS PEMANGKU KEPENTINGAN



FLEKSIBILITAS KELEMBAGAAN



PENDANAAN



BINDING MECHANISM

3. DUKUNGAN ANALISIS KEBIJAKAN MELALUI KAJIAN- KAJIAN DI TINGKAT NASIONAL

LAPORAN 1 | ANALISIS KELEMBAGAAN, PERENCANAAN, DAN OPSI PEMBIAYAAN/PENDANAAN



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian ini memetakan 203 isu pengelolaan sampah yang ada di Indonesia berikut hubungan sebab akibat diantaranya. Analisis jaringan dengan triangulasi data kota/kabupaten percontohan digunakan untuk merumuskan isu prioritas yang perlu ditangani. Analisis disusun dengan mengacu kepada Konsep *Integrated Sustainable Waste Management* (ISWM) dan *Operator Model* (OM) yang dijalankan dalam siklus perbaikan berkelanjutan (*Continuous Improvement Cycle*).

Rekomendasi utama kajian ini disajikan dalam “6 Quick Wins Reformasi Pengelolaan Sampah” yang dilengkapi dengan daftar **rencana aksi untuk periode jangka pendek, menengah, dan panjang** bagi setiap pemangku kepentingan kunci.

SCAN TO READ



LAPORAN 2 | SAMPLING DATA SAMPAH DI 6 KOTA/KABUPATEN PERCONTOHAN



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian ini mengidentifikasi data timbulan sampah dan komposisi sampah di sepanjang rantai nilai pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi, Kota Jambi, Kabupaten Bogor, Kota Cirebon, Kota Malang, dan Kota Denpasar.

Hasil kajian menunjukkan bahwa timbulan sampah di 6 kota/kabupaten bervariasi antara 0.5 kg sampai 1.2 kg/ kapita.hari, dengan timbulan sampah rata-rata 0.8 kg/ kap hari. Komposisi sampah di 6 kabupaten kota didominasi oleh sampah makanan (48%) sampah plastik (16%) dan sampah taman (13%). Dilihat dari sumbernya, sampah rumah tangga merupakan penyumbang timbulan sampah dominan jika dibandingkan non rumah tangga.

Di tingkat nasional, kajian ini menganalisis trend timbulan dan komposisi sampah nasional untuk merumuskan poin-poin evaluasi dan rekomendasi untuk pembaruan SNI 19- 3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan dan rekomendasi kebijakan untuk standar spesifikasi laju timbulan sampah dalam SNI 8632:2018, SNI 19-3983-1995 dan Lampiran PermenLHK 6/2023

SCAN TO READ



3. DUKUNGAN ANALISIS KEBIJAKAN MELALUI KAJIAN- KAJIAN DI TINGKAT NASIONAL

LAPORAN 3 | INTEGRASI SEKTOR INFORMAL



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian ini mengidentifikasi profil sektor informal dalam pengelolaan sampah di 6 kota/kabupaten wilayah proyek serta memberikan rekomendasi peta jalan integrasi sektor informal dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Di wilayah kajian, pelaku sektor informal, seperti pemulung, dan pengepul, membantu mengumpulkan hingga 86% dari total sampah yang dikumpulkan di kota/kabupaten untuk daur ulang. Skema integrasi sektor informal dapat dilakukan antara sektor informal dengan pemerintah maupun sektor informal dengan swasta berupa legalisasi/ formalisasi pekerja sektor informal baik secara individu maupun kelompok/asosiasi untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah secara legal dan terorganisir. Strategi peta jalan untuk mengintegrasikan sektor informal ke dalam pengelolaan sampah mencakup pengembangan regulasi pendukung serta penguatan skema kelembagaan dan kemitraan untuk pelibatan sektor informal.

SCAN TO READ



LAPORAN 4 | KEBERLANJUTAN FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian ini memetakan profil Fasilitas Pemilahan dan Pengolahan Sampah (FPPS) di wilayah proyek serta mengevaluasi dan merumuskan strategi untuk peningkatan kinerja dan keberlanjutan FPPS. Beberapa faktor penting yang teridentifikasi mendukung keberlanjutan FPPS meliputi pembiayaan, tata kelola, sarana dan prasarana, kapasitas sumber daya manusia, serta skema bisnis dan pemasaran. Sementara itu sorotan strategi keberlanjutan FPSS di Indonesia meliputi penguatan kerja sama antar lembaga, optimalisasi pendanaan serta peningkatan kapasitas dan edukasi pemangku kepentingan terkait.

SCAN TO READ



PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN



PERBAIKAN PENGELOLAAN DATA PENGELOLAAN SAMPAH



PENINGKATAN KAPASITAS PEMANGKU KEPENTINGAN



FLEKSIBILITAS KELEMBAGAAN



PENDANAAN



BINDING MECHANISM

3. DUKUNGAN ANALISIS KEBIJAKAN MELALUI KAJIAN- KAJIAN DI TINGKAT NASIONAL

LAPORAN 5 | PERBANDINGAN TEKNOLOGI PEMROSESAN AKHIR SAMPAH



RINGKASAN EKSEKUTIF

Studi ini membandingkan 3 teknologi termal untuk pengolahan akhir sampah: **Refuse Derived Fuel (RDF)**, **Landfill Mining (LM)**, dan **Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)**. Analisis melibatkan evaluasi kinerja teknologi berdasarkan kemampuan reduksi sampah, kebutuhan lahan, serta aspek finansial seperti CAPEX, OPEX, dan pendapatan. Rekomendasi studi ini menunjukkan bahwa dalam skenario pembiayaan oleh pemerintah maupun swasta, RDF adalah teknologi yang paling aman dan efisien, dengan nilai CAPEX dan OPEX rendah serta kemampuan reduksi sampah yang tinggi. Studi ini merekomendasikan skema pembiayaan CAPEX yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat dengan catatan pembiayaan ini telah dianggarkan dan tanpa mempertimbangkan pengembalian dana yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat.

SCAN TO READ



PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN



PERBAIKAN PENGELOLAAN DATA PENGELOLAAN SAMPAH



PENINGKATAN KAPASITAS PEMANGKU KEPENTINGAN



FLEKSIBILITAS KELEMBAGAAN



PENDANAAN



BINDING MECHANISM

LAPORAN 6 | ANALISIS OFF-TAKER RDF



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian ini berisi analisis potensi pemanfaatan Refuse Derived Fuel (RDF) dengan fokus Industri Pengolahan. Mempertimbangkan jenis industri lahap energi dengan sistem pengendalian emisi yang baik, kajian ini merekomendasikan prioritas pengembangan implementasi RDF pada empat sub-sektor industri, yaitu (1) Industri Semen; (2) Industri Pupuk; (3) Industri Pulp dan Kertas; (4) Industri Besi dan Baja.

Untuk memperoleh pemahaman bersama, kajian ini memaparkan definisi RDF dan praktik baik pemanfaatan RDF di negara lain. Rekomendasi dihasilkan melalui analisis mendalam terkait proses industri, besar kebutuhan bahan bakar, serta tantangan pemanfaatan RDF. Sebagai informasi pelengkap, kajian in juga memetakan secara umum, lokasi pabrik industri eksisting yang berpotensi memanfaatkan RDF, disertai estimasi jarak pabrik dengan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terdekat yang berpotensi menyediakan pasokan sampah untuk produksi RDF.

SCAN TO READ



RINGKASAN REKOMENDASI REFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH

1 PERENCANAAN YANG BERKUALITAS

- Sinkronisasi indikator dan target Pengelolaan Sampah Nasional dan Daerah dalam RPJPN/D, RPJMN/D Jakstranas, RAN PSL, RAN TPB, dan Permen PU No. 21/2006;
- Kesesuaian penetapan target pengelolaan sampah prov/kab/kota dengan kapasitas dan kondisi daerahnya.
- Dokumen rencana induk pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang memuat aspek fisik dan tata kelola.

2 DATA PERSAMPAHAN YANG AKTUAL DAN AKURAT

- Penghapusan standar laju timbulan sampah untuk mendorong pemda melakukan sampling sampah primer (SNI 8632:2018, SNI 19-3983-1995, dan Permen LHK No. 6/2022).
- Pembaruan SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan.
- Penyeragaman standar dan format data persampahan pada seluruh sistem informasi
- Pengaturan mekanisme pencatatan dan pelaporan kegiatan pengelolaan sampah sampai ke level operator dalam peraturan daerah.

3 KAPASITAS PEMANGKU KEPENTINGAN YANG MEMADAI

- Pembentukan gugus tugas kabupaten/kota lintas sektor untuk sinergi, komunikasi, dan kerjasama pengelolaan sampah sehingga mendorong peningkatan kapasitas pemangku kepentingan secara kolektif.
- Penyediaan pembiayaan untuk peningkatan kapasitas pemangku kepentingan (dalam APBD, kolaborasi mitra pembangunan, kerjasama, dll).
- Kejelasan alternatif Tenaga Harian Lepas (THL) untuk pengelolaan sampah (terkait penghapusan THL dalam SE MenPAN RB No.:B/165/M.SM.02.03/2022).

SCAN TO
READ

4 KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SAMPAH YANG INKLUSIF

- Pembagian peran, fungsi dan wilayah kerja antar pelaku pengelola sampah (masyarakat, sektor informal, pihak swasta dan pemerintah daerah) dari hulu ke hilir perlu dipetakan dengan jelas oleh pemda.
- Pelibatan dan pelimpahan kewenangan kepada masyarakat (RT, RW, Kelurahan, Kecamatan) sebagai operator dalam sistem pengelolaan sampah yang diikat secara legal dalam sebuah peraturan daerah.
- Integrasi pekerja sektor informal dalam pengelolaan sampah perlu didukung dengan adanya payung hukum melalui revisi Undang-Undang Persampahan No. 18 Tahun 2008.

5 PENDANAAN YANG KUAT

- Implementasi Permendagri No. 7/2021 yang berorientasi kepada UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
- Pengembangan muatan Permendagri No. 7/2021 untuk menghasilkan model keuangan yang lebih akurat (misalnya komponen nilai uang terhadap waktu, dll) oleh Bappenas, PUPR dan Kemendagri.
- Efisiensi belanja sistem pengelolaan sampah melalui implementasi manajemen sistem pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai peraturan yang berlaku, termasuk penerapan sistem akuntansi BMD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.

6

BINDING MECHANISM

Binding Mechanism diartikan sebagai mekanisme yang mempunyai kekuatan mengikat berupa kebijakan/ketentuan terhadap implementasi atas kesepakatan bersama terhadap rekomendasi untuk perbaikan sistem pengelolaan sampah.

REFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL

PROYEK PENGURANGAN EMISI
DI PERKOTAAN MELALUI PENINGKATAN
PENGELOLAAN SAMPAH (ERIC - DKT1)

